



Collaborative Action dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar

Collaborative Action in the Utilization of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) for Poverty Alleviation in Makassar City

Mita Arnika^{1*}, Juwita Pratiwi Lukman², Kamsina³

¹ Administrasi Publik, Universitas Indonesia Timur, Indonesia.

E-mail: arnikamita01@gmail.com

² Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.

E-mail: juwitalukman96@gmail.com

³ Administrasi Negara, Universitas Tomakaka, Indonesia.

E-mail: kamsinamursi@gmail.com

*Author correspondence: arnikamita01@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submitted:

2026-05-02

Revised:

2026-06-02

Accepted:

2026-06-05

Published:

2026-06-28

Keywords: collaborative action; SIKS-NG; poverty alleviation; e-government; collaborative governance

Kata Kunci: collaborative action; SIKS-NG; penanggulangan kemiskinan; e-government; tata kelola kolaboratif

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

This study examines collaborative action in the utilization of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) for poverty alleviation in Makassar City. The study focuses on how various stakeholders collaborate in managing the Integrated Social Welfare Data (DTKS) through the implementation of SIKS-NG. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The research was conducted in Tallo District and Pulau Lakkang Sub-district, involving informants from the Social Affairs Office, district and sub-district governments, SIKS-NG operators, social facilitators, neighborhood leaders, and community members. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while data validity was ensured through source, technique, and time triangulation. The findings reveal that collaborative action in the utilization of SIKS-NG is reflected through three main dimensions: principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. Principled engagement is demonstrated through coordination and joint verification among stakeholders in the process of poverty data collection and validation. Shared motivation is reflected in the common commitment to improving the accuracy of poverty data and ensuring more targeted social assistance distribution. Meanwhile, capacity for joint action is supported by institutional cooperation, human resources, and digital technology, although challenges remain in terms of technical capacity, internet connectivity, and public understanding of the system. The study also finds that SIKS-NG contributes to more structured, transparent, and accountable poverty data management, thereby supporting the accuracy of social assistance targeting. This study concludes that the successful implementation of SIKS-NG depends not only on digital technology but also on effective collaboration among

stakeholders. The findings strengthen collaborative action theory by demonstrating that digital governance initiatives require stakeholder engagement, shared commitment, and collective capacity to achieve policy objectives. Therefore, strengthening institutional coordination, improving operator capacity, and expanding digital infrastructure are essential for enhancing poverty data governance and poverty alleviation efforts in Makassar City.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis collaborative action dalam pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. Penelitian berfokus pada bagaimana berbagai aktor berkolaborasi dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui pemanfaatan aplikasi SIKS-NG. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pulau Lakkang, dengan informan yang terdiri atas Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, operator SIKS-NG, pendamping sosial, RT/RW, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative action dalam pemanfaatan SIKS-NG tercermin melalui tiga dimensi utama, yaitu principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Dimensi principled engagement terlihat melalui koordinasi dan verifikasi bersama antaraktor dalam proses pendataan dan validasi data kemiskinan. Dimensi shared motivation tercermin dari adanya komitmen bersama untuk meningkatkan akurasi data kemiskinan dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Sementara itu, dimensi capacity for joint action didukung oleh kerja sama kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi digital, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas teknis, gangguan jaringan internet, dan pemahaman masyarakat terhadap sistem. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan SIKS-NG berkontribusi terhadap pengelolaan data kemiskinan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel sehingga mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SIKS-NG tidak hanya ditentukan oleh teknologi digital, tetapi juga oleh efektivitas kolaborasi antaraktor. Temuan penelitian memperkuat teori collaborative action yang menunjukkan bahwa inisiatif pemerintahan digital memerlukan keterlibatan aktor, komitmen bersama, dan kapasitas kolektif untuk mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas operator, dan pengembangan infrastruktur digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan tata kelola data kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi melalui konsep *electronic government* atau *e-government* menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan

efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. *E-government* tidak hanya dipahami sebagai digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi tata kelola pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Hal ini sejalan dengan temuan Djabbari *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-government* berbasis website mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, meskipun masih menghadapi kendala regulasi, sosialisasi, dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi.

Dalam konteks pelayanan publik modern, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan kolaborasi antaraktor. Irfan *et al.* (2024) menegaskan bahwa kepemimpinan digital memiliki peran penting dalam mendorong adopsi kebijakan digital di sektor publik, terutama melalui kemampuan pemimpin dalam membangun budaya digital, mendorong inovasi, serta mengarahkan organisasi agar adaptif terhadap perubahan teknologi. Dengan demikian, pemanfaatan aplikasi digital dalam pelayanan publik membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta koordinasi lintas sektor.

Salah satu bentuk pemanfaatan *e-government* dalam bidang kesejahteraan sosial adalah penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendukung pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama dalam proses pengusulan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data masyarakat miskin. SIKS-NG diharapkan mampu menghasilkan data kemiskinan yang lebih akurat, terpadu, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, serta penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Dalam penelitian Ramadan *et al.* (2024), SIKS-NG disebut membantu proses pengajuan DTKS, meskipun masih ditemukan kendala berupa gangguan jaringan, keterbatasan fasilitas, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal.

Secara regulatif, pemanfaatan SIKS-NG berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin. Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi dasar penting dalam pengelolaan DTKS secara terstruktur dan berkelanjutan. Harthamia *et al.* (2025) menunjukkan bahwa SIKS-NG berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian NIK dengan data Dukcapil, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan keterbatasan pengetahuan teknologi aparatur.

Kota Makassar merupakan wilayah perkotaan yang relevan untuk dikaji dalam konteks pemanfaatan SIKS-NG karena masih menghadapi dinamika kemiskinan dan kebutuhan validasi data penerima bantuan sosial. Berdasarkan data Satu Data Kota Makassar yang bersumber dari BPS Kota Makassar, persentase penduduk miskin Kota Makassar mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu

4,82% pada 2021, menurun menjadi 4,58% pada 2022, meningkat menjadi 5,07% pada 2023, dan kembali menurun menjadi 4,97% pada 2024 (BPS Kota Makassar, 2024). Dari sisi jumlah, penduduk miskin Kota Makassar tercatat sebanyak 74.690 jiwa pada 2021, menurun menjadi 71.830 jiwa pada 2022, meningkat menjadi 80.320 jiwa pada 2023, dan menurun menjadi 79.530 jiwa pada 2024 (BPS Kota Makassar, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun persentase kemiskinan Makassar relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan beberapa daerah lain, jumlah penduduk miskin masih cukup besar sehingga memerlukan tata kelola data bantuan sosial yang akurat dan responsif.

Selain data kemiskinan, data penerima bantuan sosial juga menunjukkan pentingnya sistem informasi yang mampu menjamin akurasi dan keterpaduan data. Satu Data Kota Makassar mencatat jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 24.154 KK pada 2021 dan 23.966 KK pada 2022. Selain itu, pada 2022 tercatat 276.629 orang sebagai penerima program KIS/PBI dan 39.794 KK sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Dinas Sosial Kota Makassar, 2022). Besarnya jumlah penerima bantuan sosial tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sistem digital yang terintegrasi serta kolaborasi antaraktor agar proses pengusulan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data dapat berjalan lebih akurat dan tepat sasaran.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SIKS-NG belum sepenuhnya optimal. Yulfa & Suhita (2025) menemukan bahwa efektivitas SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Sragen masih terkendala oleh *human error*, sosialisasi program yang belum maksimal, serta rendahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap teknologi. Sementara itu, Andriani et al. (2025) dalam studi di Kabupaten Bengkulu Selatan menyimpulkan bahwa penerapan SIKS-NG belum efektif karena keterbatasan sumber daya finansial, infrastruktur teknologi, dan tenaga ahli IT, meskipun aplikasi ini telah memberikan manfaat dalam akses informasi bantuan sosial. Mulyadi & Magriasti (2025) juga menunjukkan bahwa SIKS-NG berperan dalam meningkatkan ketepatan sasaran, mempercepat verifikasi dan validasi data, serta mendukung transparansi distribusi bantuan, tetapi masih terkendala infrastruktur digital dan integrasi data antarinstansi.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas implementasi dan efektivitas SIKS-NG, sebagian besar kajian terdahulu masih berfokus pada aspek teknis aplikasi, efektivitas sistem, atau kendala implementasi. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti efektivitas implementasi SIKS-NG, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis *collaborative action* antaraktor dalam pemanfaatan SIKS-NG masih terbatas. Padahal, pemanfaatan SIKS-NG tidak hanya berkaitan dengan kemampuan operator menjalankan aplikasi, tetapi juga melibatkan kerja sama berbagai aktor, seperti Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, kelurahan, operator SIKS-NG, RT/RW, pendamping sosial, dan masyarakat. Kolaborasi antaraktor menjadi penting karena kualitas data kemiskinan sangat bergantung pada proses pendataan, pengusulan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data yang dilakukan secara bersama.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan SIKS-NG tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan teknis aplikasi, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola kolaboratif. Dalam perspektif *collaborative action*, penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor agar proses pengelolaan data dan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan responsif. Dalam kajian demokrasi lokal, nilai partisipasi masyarakat seperti musyawarah dan gotong royong juga dipandang mampu memperkuat praktik tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga (Yanto & Ashar, 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis *collaborative action* dalam pemanfaatan SIKS-NG pada tingkat lokal yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan dan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat SIKS-NG sebagai aplikasi digital, tetapi juga sebagai ruang kerja bersama antara aktor pemerintah dan masyarakat dalam membangun tata kelola data kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian *e-government* dan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana *collaborative action* dalam pemanfaatan aplikasi SIKS-NG untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana kolaborasi antaraktor berlangsung, bagaimana aplikasi SIKS-NG dimanfaatkan dalam proses pengelolaan data kemiskinan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola *e-government*, peningkatan kualitas data kemiskinan, dan perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis kolaborasi di tingkat lokal.

Kajian Literatur

E-Government dalam Pelayanan Publik

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks administrasi publik, e-government tidak hanya dipahami sebagai penggunaan aplikasi digital, tetapi juga sebagai upaya transformasi birokrasi agar pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Djabbari et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan e-government berbasis website di Desa Tondowolio mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan, meskipun masih menghadapi kendala regulasi, sosialisasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.

Keberhasilan e-government juga dipengaruhi oleh kepemimpinan digital. Pemimpin digital dituntut memiliki kemampuan memahami teknologi, mendorong inovasi, membangun budaya digital, serta mengarahkan organisasi agar adaptif terhadap perubahan. Irfan dkk. menegaskan bahwa kepemimpinan digital menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi kebijakan digital di sektor publik, terutama dalam meningkatkan pelayanan, budaya organisasi, dan efektivitas kebijakan digital (Irfan et al., 2024).

SIKS-NG sebagai Instrumen Pengelolaan Data Kemiskinan

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendukung pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Aplikasi ini digunakan dalam proses pengusulan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data masyarakat miskin agar bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Ramadan et al. (2024) menjelaskan bahwa SIKS-NG membantu kelurahan dalam proses pengajuan DTKS dan mempermudah pengelolaan data bantuan sosial. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala seperti gangguan jaringan, fasilitas yang belum memadai, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Harthamia et al. (2025) juga menemukan bahwa SIKS-NG membantu pengelolaan data penerima bantuan sosial dan meningkatkan akurasi data kemiskinan. Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian NIK dengan data Dukcapil, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan rendahnya pengetahuan teknologi aparatur.

Efektivitas Pemanfaatan SIKS-NG

Efektivitas SIKS-NG dapat dilihat dari sejauh mana aplikasi ini mampu mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kualitas data kemiskinan. Yulfa & Suhita (2025) menemukan bahwa efektivitas SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Sragen masih bervariasi. Tujuan program dan pemantauan dinilai sudah berjalan cukup baik, tetapi ketepatan sasaran dan sosialisasi belum optimal karena masih terjadi human error dan keterbatasan pemahaman teknologi. Penelitian Andriani et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan SIKS-NG belum efektif. Meskipun terdapat dukungan dari pemerintah daerah, kapasitas finansial, infrastruktur teknologi, dan tenaga ahli IT masih belum memadai. Kondisi ini menyebabkan masih adanya masyarakat miskin yang belum terdata secara optimal. Sementara itu, Muliyadi & Magriasti (2025) menyatakan bahwa SIKS-NG berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan program kesejahteraan sosial. Aplikasi ini membantu meningkatkan ketepatan sasaran, mempercepat verifikasi dan validasi data, serta mendukung transparansi distribusi bantuan. Namun, hambatan masih ditemukan pada aspek infrastruktur digital dan integrasi data antarinstansi pemerintah daerah.

Collaborative Action Theory

Collaborative action merupakan tindakan bersama yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dalam konteks administrasi publik, *collaborative action* berkaitan erat dengan tata kelola kolaboratif, yaitu proses kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan masalah, berbagi sumber daya, membangun kepercayaan, serta menghasilkan keputusan atau tindakan bersama.

Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa kolaborasi dalam tata kelola publik menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara yang dapat

memperkuat keberlanjutan kerja sama. Dalam konteks pemanfaatan SIKS-NG, kolaborasi tidak hanya berarti keterlibatan formal antarinstansi, tetapi juga mencakup kerja bersama antara Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, operator SIKS-NG, RT/RW, pendamping sosial, dan masyarakat dalam proses pendataan, pengusulan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data kemiskinan.

Emerson & Nabatchi (2015) mengembangkan konsep *collaborative governance regime* yang menekankan bahwa tindakan kolaboratif dapat terbentuk apabila terdapat dinamika kolaborasi yang kuat. Dinamika tersebut mencakup tiga unsur utama, yaitu *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Ketiga unsur ini dapat digunakan sebagai indikator analisis untuk memahami keberhasilan atau hambatan *collaborative action* dalam pemanfaatan SIKS-NG.

Pertama, *principled engagement* merujuk pada proses keterlibatan aktor secara terbuka dan terarah dalam mengidentifikasi masalah, menyampaikan informasi, berdiskusi, serta membangun keputusan bersama. Dalam pemanfaatan SIKS-NG, indikator ini dapat dilihat dari bagaimana Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, kelurahan, operator, RT/RW, pendamping sosial, dan masyarakat terlibat dalam proses pendataan dan verifikasi data kemiskinan. Keterlibatan yang baik ditunjukkan melalui adanya komunikasi yang jelas, mekanisme pengusulan yang dipahami bersama, serta partisipasi aktor lokal dalam memastikan kebenaran data calon penerima bantuan sosial.

Kedua, *shared motivation* berkaitan dengan kepercayaan, saling memahami, legitimasi, dan komitmen bersama antaraktor. Kolaborasi dalam SIKS-NG membutuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, terutama karena data kemiskinan berhubungan langsung dengan akses terhadap bantuan sosial. Jika masyarakat percaya bahwa data dikelola secara transparan dan adil, maka partisipasi dalam pelaporan dan pemutakhiran data akan meningkat. Sebaliknya, kurangnya informasi mengenai progres usulan bantuan sosial dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan.

Ketiga, *capacity for joint action* menunjukkan kemampuan para aktor untuk bertindak bersama melalui dukungan sumber daya, pengetahuan, kepemimpinan, infrastruktur, dan prosedur kerja yang jelas. Dalam konteks SIKS-NG, kapasitas bersama mencakup kemampuan teknis operator, ketersediaan perangkat komputer dan jaringan internet, dukungan Dinas Sosial, koordinasi antarlevel pemerintahan, serta kemampuan masyarakat dalam menyediakan data yang valid. Apabila kapasitas ini lemah, maka pemanfaatan SIKS-NG akan menghadapi kendala, seperti keterlambatan input data, kesalahan administrasi, dan kurang optimalnya pemutakhiran DTKS.

Dengan demikian, *collaborative action* dalam pemanfaatan SIKS-NG dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Ketiga indikator tersebut membantu menjelaskan bahwa keberhasilan SIKS-NG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kualitas hubungan antaraktor, kepercayaan masyarakat, serta kapasitas bersama dalam mengelola data kemiskinan. Kerangka ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana kolaborasi berlangsung, faktor

apa saja yang mendukung, dan kendala apa yang menghambat pemanfaatan SIKS-NG dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses *collaborative action* dalam pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, terutama berkaitan dengan peran aktor, pola kerja sama, mekanisme koordinasi, pemanfaatan aplikasi, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan data kemiskinan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan fokus pada wilayah yang telah menggunakan aplikasi SIKS-NG dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pulau Lakkang. Lokasi ini dipilih karena telah menerapkan SIKS-NG dalam proses pengusulan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Selain itu, wilayah tersebut juga memperlihatkan adanya keterlibatan berbagai aktor, seperti Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, operator SIKS-NG, pendamping sosial, RT/RW, dan masyarakat.

Informan penelitian ditentukan berdasarkan keterlibatan langsung dalam pemanfaatan SIKS-NG dan pengelolaan data kemiskinan. Informan terdiri atas aparatur pemerintah, operator aplikasi, pendamping sosial, dan masyarakat yang mengetahui atau mengalami proses pengusulan bantuan sosial. Rincian informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Jumlah	Keterangan
Dinas Sosial Kota Makassar	2 orang	Pejabat/staf yang menangani DTKS dan SIKS-NG
Pemerintah Kecamatan	1 orang	Aparat kecamatan yang terlibat dalam koordinasi data sosial
Pemerintah Kelurahan	2 orang	Aparat kelurahan yang menangani administrasi sosial masyarakat
Operator SIKS-NG	2 orang	Operator yang melakukan input, pembaruan, dan pengusulan data
Pendamping Sosial	2 orang	Pendamping yang membantu verifikasi dan pendampingan masyarakat
RT/RW	2 orang	Aktor lokal yang mengetahui kondisi sosial warga
Masyarakat	4 orang	Penerima atau calon penerima bantuan sosial
Total	15 orang	

Teknik pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pemanfaatan aplikasi SIKS-NG. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, dan operator SIKS-NG karena mereka terlibat langsung dalam proses pengelolaan DTKS. Sementara itu, *snowball sampling* digunakan untuk menemukan informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya, terutama masyarakat, RT/RW, atau pendamping sosial yang memahami proses pengusulan dan verifikasi data bantuan sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses kolaborasi antaraktor, mekanisme pengusulan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data, serta kendala dalam pemanfaatan aplikasi SIKS-NG. Observasi langsung dilakukan untuk melihat kondisi sarana dan prasarana, proses penggunaan aplikasi, serta interaksi antaraktor dalam pengelolaan data kemiskinan. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen yang relevan, seperti data DTKS, laporan pengusulan bantuan sosial, regulasi terkait SIKS-NG dan DTKS, arsip kelurahan atau kecamatan, serta dokumen pendukung lainnya.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, operator SIKS-NG, pendamping sosial, RT/RW, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan memeriksa konsistensi informasi pada waktu yang berbeda, terutama terkait proses pengusulan dan perkembangan status data bantuan sosial. Penggunaan triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Tahap *data condensation* dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengorganisasi data yang relevan dengan fokus penelitian, terutama data mengenai *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action* dalam pemanfaatan SIKS-NG. Tahap *data display* dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan kategori tematik agar pola kolaborasi antaraktor dapat dipahami secara sistematis. Tahap *conclusion drawing/verification* dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola temuan yang muncul, kemudian memverifikasi kesimpulan tersebut melalui perbandingan antar sumber data dan teknik pengumpulan data.

Dengan desain metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana *collaborative action* berlangsung dalam pemanfaatan SIKS-NG, bagaimana peran masing-masing aktor dalam pengelolaan data kemiskinan, serta faktor-faktor yang mendukung dan

menghambat pemanfaatan SIKS-NG untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.

Hasil dan Pembahasan

Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan data kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas kolaborasi antaraktor. Aktor yang terlibat meliputi Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, operator SIKS-NG, RT/RW, pendamping sosial, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut berlangsung dalam proses pengumpulan data, pengusulan calon penerima bantuan, verifikasi lapangan, validasi administrasi, hingga pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aplikasi SIKS-NG telah membantu pemerintah daerah dalam mengelola data kemiskinan secara lebih terstruktur. Namun, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman teknis operator, gangguan jaringan, keterbatasan sarana pendukung, serta belum jelasnya informasi mengenai progres usulan bantuan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SIKS-NG perlu dipahami sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif, bukan sekadar penggunaan aplikasi digital.

Principled Engagement dalam Pemanfaatan SIKS-NG

Principled engagement merujuk pada proses keterlibatan aktor secara terbuka dan terarah dalam mengidentifikasi masalah, menyampaikan informasi, berdiskusi, dan membangun keputusan bersama (Emerson & Nabatchi, 2015). Dalam konteks pemanfaatan SIKS-NG di Kota Makassar, prinsip ini terlihat dari keterlibatan berbagai aktor dalam proses pendataan dan verifikasi data kemiskinan. Dinas Sosial berperan sebagai aktor utama yang mengoordinasikan kebijakan dan memberikan arahan teknis terkait pengelolaan DTKS. Pemerintah kecamatan dan kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan tingkat kota dan kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing. Sementara itu, RT/RW dan pendamping sosial berperan memberikan informasi awal mengenai kondisi warga yang layak diusulkan sebagai penerima bantuan sosial. Operator SIKS-NG kemudian bertugas memasukkan dan memperbarui data ke dalam sistem.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa verifikasi data tidak dilakukan secara sepihak oleh operator, tetapi melibatkan aktor lokal yang memahami kondisi masyarakat. Salah satu operator SIKS-NG menyatakan:

"Kami melakukan verifikasi data bersama RT/RW sebelum data dimasukkan ke dalam SIKS-NG. Biasanya data dari warga dicek dulu apakah sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian baru diusulkan melalui aplikasi." Operator SIKS-NG Kelurahan Pulau Lakkang

Kutipan tersebut menunjukkan adanya proses dialog dan pengecekan bersama sebelum data dimasukkan ke dalam aplikasi. Proses ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa kolaborasi dalam tata kelola publik membutuhkan

komunikasi, dialog, dan keterlibatan aktor dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks SIKS-NG, dialog tidak selalu berlangsung dalam forum formal, tetapi dapat terjadi melalui koordinasi harian antara kelurahan, operator, RT/RW, dan pendamping sosial.

Berdasarkan observasi, proses pemanfaatan SIKS-NG melibatkan tahapan administratif dan verifikasi sosial. Aparatur kelurahan menerima laporan atau pengajuan dari masyarakat, kemudian mencocokkan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Nomor Induk Kependudukan. Setelah itu, data dikonfirmasi melalui RT/RW atau pendamping sosial sebelum diinput ke dalam aplikasi. Proses ini menunjukkan bahwa kualitas data DTKS sangat bergantung pada keterlibatan aktor lokal dalam memastikan kesesuaian data administratif dan kondisi sosial ekonomi warga. Aktivitas kolaborasi dalam pemanfaatan SIKS-NG dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Aktivitas Kolaborasi dalam Pemanfaatan SIKS-NG

Aktor	Bentuk Keterlibatan	Tahapan Pemanfaatan SIKS-NG
Dinas Sosial	Pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan arahan teknis	Validasi dan koordinasi data
Kecamatan	Koordinasi antar kelurahan dan fasilitasi administrasi	Pengusulan dan monitoring
Kelurahan	Penerimaan usulan warga, pemeriksaan dokumen, koordinasi lokal	Pengusulan dan pemutakhiran data
Operator SIKS-NG	Input data, pembaruan data, pengecekan status usulan	Penginputan dan pemutakhiran sistem
RT/RW	Identifikasi awal warga miskin dan konfirmasi kondisi lapangan	Pendataan dan verifikasi awal
Pendamping Sosial	Pendampingan masyarakat dan validasi kondisi sosial	Verifikasi dan pendampingan
Masyarakat	Menyampaikan usulan, melengkapi dokumen, memberi informasi kondisi sosial ekonomi	Pengajuan dan klarifikasi data

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dan observasi penelitian.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan SIKS-NG merupakan proses yang melibatkan banyak aktor. Jika salah satu aktor tidak menjalankan perannya dengan baik, maka proses pengusulan dan pemutakhiran data dapat mengalami hambatan. Oleh karena itu, *principled engagement* menjadi aspek penting dalam memastikan seluruh aktor memiliki pemahaman yang sama mengenai alur pengelolaan data kemiskinan.

Shared Motivation antar Pemangku Kepentingan

Shared motivation berkaitan dengan kepercayaan, saling memahami, legitimasi, dan komitmen bersama antaraktor (Emerson & Nabatchi, 2015). Dalam pemanfaatan SIKS-NG, motivasi bersama muncul dari kesadaran bahwa data kemiskinan yang akurat menjadi dasar penting bagi ketepatan sasaran bantuan sosial. Dinas Sosial, kelurahan, operator, RT/RW, pendamping sosial, dan

masyarakat memiliki kepentingan yang sama, yaitu memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat masuk dalam data usulan bantuan sosial. Hasil wawancara dengan aparatur kelurahan menunjukkan bahwa pemanfaatan SIKS-NG dipandang sebagai sarana untuk mengurangi kesalahan data dan memperbaiki proses pengusulan bantuan sosial. Seorang aparatur kelurahan menyampaikan:

"Kalau dulu masyarakat sering mengeluh karena merasa layak menerima bantuan tetapi belum masuk data. Sekarang dengan SIKS-NG, usulan bisa lebih tertib, walaupun tetap harus menunggu proses dari sistem dan pusat." Aparatur Kelurahan Pulau Lakkang

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SIKS-NG dipahami sebagai instrumen untuk meningkatkan keteraturan pengelolaan data. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap sistem masih dipengaruhi oleh kejelasan informasi mengenai progres usulan bantuan sosial. Dalam beberapa kasus, masyarakat belum memahami bahwa pengusulan melalui SIKS-NG tidak secara otomatis membuat seseorang langsung menerima bantuan. Data yang diusulkan tetap harus melalui proses verifikasi, validasi, dan penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *shared motivation* belum sepenuhnya kuat apabila komunikasi mengenai status usulan belum berjalan optimal. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan apabila tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan usulan diterima, ditolak, atau belum diproses. Hal ini sejalan dengan Ansell dan Gash (2008) yang menekankan bahwa kepercayaan dan pemahaman bersama merupakan elemen penting dalam keberhasilan kolaborasi. Tanpa komunikasi yang terbuka, kolaborasi dapat melemah karena aktor yang terlibat memiliki persepsi berbeda terhadap tujuan dan hasil proses.

Dari sisi aktor pemerintah, motivasi bersama terlihat dari upaya untuk memperbaiki kualitas data kemiskinan. Namun, motivasi ini perlu diperkuat melalui sosialisasi rutin, forum koordinasi, dan mekanisme umpan balik kepada masyarakat. Sosialisasi tidak hanya penting untuk menjelaskan fungsi SIKS-NG, tetapi juga untuk memperjelas bahwa aplikasi tersebut merupakan bagian dari sistem pengelolaan data, bukan jaminan langsung untuk memperoleh bantuan sosial.

Capacity for Joint Action dalam Pengelolaan Data Kemiskinan

Capacity for joint action menunjukkan kemampuan para aktor untuk bertindak bersama melalui dukungan sumber daya, pengetahuan, prosedur, kepemimpinan, dan infrastruktur (Emerson & Nabatchi, 2015). Dalam pemanfaatan SIKS-NG, kapasitas bersama menjadi faktor penting karena pengelolaan data kemiskinan membutuhkan keterampilan teknis, jaringan internet, perangkat komputer, koordinasi kelembagaan, dan pemahaman prosedural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas bersama dalam pemanfaatan SIKS-NG masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, kemampuan teknis operator belum merata. Tidak semua operator memiliki tingkat pemahaman yang

sama dalam mengoperasikan aplikasi, membaca status data, memperbaiki data yang bermasalah, atau menjelaskan alur pengusulan kepada masyarakat. Salah satu informan menyampaikan:

"Kadang kendalanya bukan hanya di aplikasi, tetapi juga pemahaman operator. Kalau ada data yang tertolak atau tidak sinkron, perlu waktu untuk mencari tahu letak kesalahannya." Staf Dinas Sosial Kota Makassar

Kedua, sarana dan prasarana digital belum sepenuhnya memadai. Dalam observasi, penggunaan SIKS-NG sangat bergantung pada ketersediaan komputer, koneksi internet, dan akses sistem. Gangguan jaringan dapat memperlambat input data dan pembaruan usulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan aplikasi digital tidak hanya bergantung pada sistem yang dikembangkan pemerintah pusat, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur di tingkat lokal.

Ketiga, koordinasi antaraktor masih perlu diperkuat. Pemerintah kelurahan sering menjadi pihak pertama yang menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai status bantuan sosial. Namun, informasi mengenai progres usulan tidak selalu dapat dijelaskan secara cepat karena proses validasi melibatkan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kesenjangan informasi antara masyarakat, operator, dan instansi terkait.

Berdasarkan teori *collaborative governance*, kapasitas untuk bertindak bersama tidak hanya mencakup sumber daya material, tetapi juga kemampuan aktor untuk menggunakan sumber daya tersebut secara kolektif (Emerson & Nabatchi, 2015). Dalam konteks SIKS-NG, kapasitas bersama dapat diperkuat melalui pelatihan operator, penyediaan perangkat kerja yang memadai, peningkatan kualitas jaringan, penyusunan SOP alur pengusulan, serta forum koordinasi rutin antara Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan pendamping sosial.

Dampak Collaborative Action terhadap Akurasi DTKS

Pemanfaatan SIKS-NG memberikan dampak positif terhadap pengelolaan data kemiskinan, terutama dalam mendorong proses pendataan yang lebih sistematis dan terdokumentasi. Melalui kolaborasi antaraktor, data yang masuk ke dalam sistem tidak hanya berasal dari dokumen administratif, tetapi juga dikonfirmasi berdasarkan pengetahuan aktor lokal mengenai kondisi sosial masyarakat. Hal ini penting karena data kemiskinan tidak selalu dapat dipahami hanya melalui dokumen kependudukan, tetapi juga memerlukan verifikasi terhadap kondisi faktual warga.

Kolaborasi antara RT/RW, pendamping sosial, kelurahan, dan operator membantu mengurangi potensi kesalahan data. RT/RW memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi warga, sedangkan pendamping sosial dapat membantu menjelaskan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Operator SIKS-NG kemudian memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan format dan persyaratan sistem. Dengan demikian, *collaborative action* berperan dalam memperkuat kualitas data, baik dari sisi administratif maupun faktual. Salah satu pendamping sosial menjelaskan:

"Data dari masyarakat tidak bisa langsung dimasukkan begitu saja. Kami perlu memastikan apakah orang tersebut memang tinggal di wilayah itu, bagaimana kondisi ekonominya, dan apakah dokumennya sudah sesuai." Pendamping Sosial

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi bersama menjadi mekanisme penting dalam meningkatkan akurasi DTKS. Temuan ini sejalan dengan gagasan Ansell dan Gash (2008) bahwa kolaborasi dapat meningkatkan kualitas keputusan publik karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki informasi dan perspektif berbeda. Dalam pemanfaatan SIKS-NG, informasi dari masyarakat dan aktor lokal membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi calon penerima bantuan sosial.

Namun, dampak kolaborasi terhadap akurasi data belum sepenuhnya optimal. Kendala seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, ketidaksesuaian data kependudukan, gangguan jaringan, dan lambatnya informasi balik dari sistem dapat menghambat kualitas pemutakhiran DTKS. Oleh karena itu, peningkatan akurasi data tidak hanya membutuhkan aplikasi SIKS-NG, tetapi juga pembenahan komunikasi, validasi lapangan, dan koordinasi antaraktor secara berkelanjutan.

Hambatan dalam Pemanfaatan SIKS-NG

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan utama dalam pemanfaatan SIKS-NG. Pertama, keterbatasan pemahaman teknis operator dan aparatur. Hambatan ini berpengaruh pada kecepatan input data, perbaikan data bermasalah, dan kemampuan menjelaskan status usulan kepada masyarakat. Kedua, sarana dan prasarana belum merata, terutama perangkat komputer dan jaringan internet. Ketiga, komunikasi mengenai progres usulan bantuan sosial belum optimal. Masyarakat sering kali menanyakan status pengajuan, tetapi aparatur kelurahan atau operator belum selalu dapat memberikan kepastian karena proses penetapan bantuan melibatkan mekanisme yang lebih luas.

Keempat, masih terdapat potensi perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika data sudah diusulkan melalui SIKS-NG, maka bantuan sosial akan segera diterima. Padahal, SIKS-NG berfungsi sebagai sistem pengelolaan data dan pengusulan, bukan instrumen penetapan langsung penerima bantuan. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pemanfaatan SIKS-NG bukan hanya teknis, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tata kelola kolaboratif. Dalam perspektif Emerson dan Nabatchi (2015), lemahnya kapasitas bersama dan motivasi bersama dapat menghambat keberlanjutan tindakan kolaboratif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur digital, dan penguatan komunikasi publik menjadi syarat penting dalam optimalisasi SIKS-NG.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi

digital, tetapi juga pada kualitas kolaborasi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan data kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative action* dalam pemanfaatan SIKS-NG tercermin melalui keterlibatan berbagai aktor, yaitu Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, operator SIKS-NG, RT/RW, pendamping sosial, dan masyarakat dalam proses pengusulan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka *collaborative action* dari Emerson dan Nabatchi (2015), ditemukan bahwa aspek *principled engagement* terlihat melalui keterlibatan aktor dalam proses pendataan dan verifikasi data kemiskinan. Aspek *shared motivation* tercermin dari adanya tujuan bersama untuk meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Sementara itu, aspek *capacity for joint action* terlihat dari kemampuan para aktor untuk bekerja sama melalui dukungan sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi digital, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas teknis operator, infrastruktur digital yang belum merata, serta hambatan komunikasi terkait status usulan bantuan sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan SIKS-NG berkontribusi terhadap pengelolaan data kemiskinan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membantu meningkatkan akurasi data DTKS melalui proses verifikasi dan validasi yang melibatkan berbagai aktor lokal. Namun demikian, optimalisasi pemanfaatan SIKS-NG masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur digital, serta perbaikan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Referensi

- Andriani, D., Haris, A., & Sumardi. (2025). Strategi Keamanan Transaksi Elektronik dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government. *PENA BANGSA: Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(2), 134–147.
<https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.563>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- BPS Kota Makassar. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar, 2021-2024*. Satu Data Kota Makassar.
https://data.makassarkota.go.id/datasektoral/5?f_tahun=2022
- Dinas Sosial Kota Makassar. (2022). *Data Penerima Bantuan Sosial Kota Makassar: PKH, KIS/PBI, dan BPNT*. Satu Data Kota Makassar.
https://data.makassarkota.go.id/datasektoral/5?f_tahun=2022
- Djabbari, M. H., Irfan, B., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15588>

- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=cE5gCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Collaborative++Governance+Regime&ots=P3m8pDbNCS&sig=rV2ZOI58XvJ2rpyFhcLBJzqNSwg&redir_esc=y#v=onepage&q=Collaborative Governance Regime&f=false
- Harthamia, N. M. S., Prabawati, N. P. A., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG): Studi Kasus Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3).
<https://doi.org/10.61292/shkr.251>
- Irfan, B., Djabbari, M. H., Herianto, D., Yanto, E., & Faisal, A. F. (2024). Kepemimpinan Digital: Pengaruh dalam Mendorong Adopsi Kebijakan Digital di Sektor Publik. *Jurnal Perkembangan Kajian Sosial (PERKASA)*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.69616/perkasa.v1i2.37>
- Muliyadi, R., & Magriasti, L. (2025). Pemanfaatan Aplikasi SIKS-NG dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Program Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Teori Dan Praktek Administrasi Publik*, 9(1), 35–43.
- Ramadan, E., Nurlatifah, I., Shangadah, I. R., Ginanjar, S. E., & Santa, R. (2024). Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk Pengajuan DTKS. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 4(2), 109–115.
- Yanto, E., & Ashar, M. (2025). Implementasi Kearifan Lokal dan Demokrasi Terhadap Praktik Pemerintahan Kabupaten Wajo. *PENA BANGSA: Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(1), 61–70. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.261>
- Yulfa, S., & Suhita, D. (2025). Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Berbasis E-Government di Dinas Sosial Kabupaten Sragen. *Solidarita*, 9(1).